



**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

☐ POSITIF ☒ X ☐ NETRAL ☐ BAHAN PEMERIKSAAN ☐ PERHATIAN KHUSUS

## Tolak Hibah Bangunan Rest Area

**RIMBO PENGADANG** - Bangunan rest area Badan Kileak di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang dipastikan bakal tak terurus. Ada kemungkinan Pemkab Lebong menolak hibah fisik bangunan senilai Rp 1,2 miliar milik Provinsi Bengkulu yang dibangun tahun 2018 itu.

"Yang pasti kami belum mengecek kondisi fisik bangunannya," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Jika kondisi bangunannya sudah banyak yang rusak, Mustarani pastikan berat bagi Pemkab Lebong menerima bangunan itu. Beban Pemkab Lebong

menyediakan lahan. Sedangkan fisik bangunannya dibangun Pemprov Bengkulu. "Persoalannya bangunan rest area itu belum dihibah ke kabupaten sehingga kami tidak bisa memung्सikannya," ungkap Putra.

Tidak dipungkirinya, Pemprov Bengkulu memang sudah mengomunikasikan rencana hibah bangunan peristirahatan bagi pengendara itu. Hanya saja Bidang Aset perlu menelusuri lebih dalam fisik bangunan sesuai perjanjian yang pernah disepakati. Soalnya kondisi fisik bangunan mulai mengalami kerusakan sehingga dikhawatirkan tidak bisa digunakan. "Kami akan

akan semakin bertambah hanya untuk melakukan perbaikan. Apalagi jika memang fisik bangunannya bermasalah, tentu saja Pemkab Lebong akan menolak. "Kami juga akan meminta petunjuk Pak Bupati soal rencana hibah bangunan rest area di jalur lintas Lebong ke Rejang Lebong itu," terang Mustarani.

Sementara Kabid Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Rizka Putra Utama, M.Si mengaku memang antara Pemkab Lebong dan Pemprov Bengkulu sempat menjalin memorandum of understanding (MoU) terkait pembangunan rest area. Dalam kesepakatan, Pemkab Lebong

mengajak Pemrov Bengkulu bersamasama ke lokasi guna melihat kondisi bangunan," jelas Putra.

Jika provinsi siap memperbaiki fisik bangunan yang rusak, lanjut Putra, ada kemungkinan Pemkab Lebong menerima hibahnya sehingga bangunan itu akan masuk ke daftar aset kabupaten. Jika provinsi tidak siap, tentu saja Bidang Aset akan menolak menerima bangunan rest area itu karena butuh anggaran lagi untuk perbaikan. "Tidak mungkin juga bangunannya belum dipakai, namun kabupaten dibebankan melakukan perbaikan," tutup Putra. (sca)